UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk**
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.

Surat Edaran, Pedoman, dan Standar

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-22/A/SUJA/02/2021.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Jurnal

Assanti, Wendy Kenafiana *et al.*, 2025, "Debating Expert Authority in Corruption Cases: The Challenge of Interpreting State Financial Losses Under the 2023 Indonesian Criminal Code", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 12(3), https://doi.org/10.22304/2442-9325.1351

Hakim, U. Khairunnisa. "EKSISTENSI AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN PIDANA KORUPSI." (2014).

Rosyadi, Muhammad Imron, 2016, "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara", *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206.

Salam, Syukron, 2019, "Gugatan tersangka terhadap BPKP: Gugatan yang salah alamat dan salah kamar", *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 13.

Wuysang, Recky V. O., et al. "Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara." *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*, vol. 7, no. 2, 31 Desember 2016, https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13551.

Buku

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk**
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Norma, Teori, Praktik, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Situmorang, Victor M., dan Juhir, Jusuf, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tuanakotta, Theodorus M., 2014, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Salemba Empat, Jakarta.

Yusuf, 2014, *Auditing: Pendekatan Terpadu*, Salemba Empat, Jakarta.

Website

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk**
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Saleh, Muhamad, "BPK dan Putusan MK tentang Kerugian Negara", Kompas.id, 6 Mei 2026, https://www.kompas.id/artikel/bpk-dan-putusan-mk-tentang-kerugian-negara, diakses 26 Juni 2026.

Budi, Mulia, "Kasus Korupsi Timah Rp 300 T, Alwin Albar Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara", https://news.detik.com/berita/d-8248684/kasus-korupsi-timah-rp-300-t-alwin-albar-tetap-dihukum-12-tahun-penjara, diakses 27 Februari 2026.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, "Penetapan Tersangka Korporasi dalam Perkara Komoditas Timah", https://kejati-jatim.go.id/penetapan-tersangka-korporasi-dalam-perkara-komoditas-timah/, diakses 27 Februari 2026.

Murdian, dan Qurniawan, Ari, "Kewenangan Lembaga Audit dalam Penetapan Kerugian Negara Pasca SEMA No. 2/2024", https://dandapala.com/article/detail/kewenangan-lembaga-audit-dalam-penetapan-kerugian-negara-pasca-sema-no-22024, diakses 27 Februari 2026.

Victoria, Agatha Olivia, "Hakim Tetapkan Negara Rugi Rp 300 Triliun akibat Kasus Korupsi Timah", https://www.antaranews.com/berita/4545766/hakim-tetapkan-negara-rugi-rp300-triliun-akibat-kasus-korupsi-timah, diakses 27 Februari 2026.